

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI *ELECTRONIC GOVERNMENT* PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2014

oleh

**YOGIS KHARISMA NUGROHO**

Penerapan jaringan informasi berbasis teknologi *internet* di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai *good governance* dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah. *Electronic Government* sudah menjadi program nasional melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, pemerintah menyatakan *Electronic Government* sebagai arah strategis pengembangan layanan pemerintahan yang harus diimplementasikan ditingkat pusat dan daerah. Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai *website* sebagai wujud pelaksanaan *e-government*, salah satunya adalah adanya *website* pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Implementasi *e-government* dimasing-masing daerah tidak sama, disesuaikan dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi *e-government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Implementasi *e-government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu ini dianalisis melalui tiga indikator implementasi *e-government* yaitu (1) *Support*, (2) *Capacity*, dan (3) *Value*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan beberapa sebab yang kemudian menjadi kendala-kendala dari implementasi *e-government* tersebut. Kendala-kendala yang menjadi penghambat jalannya implementasi *e-government* di Kabupaten Pringsewu, yaitu (1) Forum Kajian Bersama, (2) Ketiadaan Regulasi Tingkat Daerah, (3) dan Organisasi Tim Pelaksana

**Kata Kunci :** *E-government*, implementasi *e-government*.